



DIREKTORAT INFORMASI DAN MEDIA

**PRESS CABLE**

**NOMOR : 239/24122008**  
**HARI : RABU**  
**TANGGAL : 24 DESEMBER 2008**

DAFTAR ISI

		Halaman
<b>I.</b>	<b>INTERNASIONAL</b>	
	INDONESIA-MALAYSIA EPG Usulkan Satgas "Pati"	3
	Putin: Krisis finansial naikkan harga gas alam	3
	China Harapkan India-Pakistan Kedepankan Dialog	4
	Malaysia Cari Investor Jembatan Selat Malaka	5
	Krisis Global Industri Masuki Masa Suram, Gaji Tak Dibayar	5
<b>II.</b>	<b>NASIONAL</b>	
	<b>A. POLITIK</b>	
	Political surveys top commodity for 2009	6
	Media Massa Harus Independen Pada Pemilu 2009	7
	Court hands power back to voters	7
	<b>B. EKONOMI</b>	
	Turunnya Harga Minyak Dunia Tak Banyak Pengaruhi Penerimaan Negara	8
	Komoditas anjlok, harga emas jatuh	9
	Latest phase of NSW online service introduced to help traders	10
	<b>C. SOSBUD</b>	
	Joop Ave: Sektor Pariwisata 2009 Penuh Tantangan	11

		Religious freedom, tolerance in jeopardy	12
		BNP2TKI Absen Ikuti Rakornas TKI	13
	<b>D.</b>	<b>HANKAM</b>	
		50.000 Polisi Siap Amankan Natal	13
	<b>E.</b>	<b>HUKUM</b>	
		Corby Si "Ratu Mariyuana" Dapat Remisi Khusus Natal	15
		UU BHP Permudah Pengusaha Kendalikan Pendidikan	15
		Inilah Penyelenggara Negara Paling Korup	16
	<b>F.</b>	<b>OLAHRAGA: Tidak Ada</b>	
	<b>G.</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>	
		Twenty three small islands facing total destruction: NGO	16
		Badai Matahari Diperkirakan Muncul 2011-2012	17
	<b>III.</b>	<b>ARTIKEL</b>	
		Christmas message seeks to foster a peaceful society oleh Aloys Budi Purnomo	17
		Partai Baru yang Primus Interminus Malum oleh Hajriyanto Y Thohari	18
	<b>IV.</b>	<b>LAIN-LAIN</b>	
		Jhony S. Mundung: Ini Gong Kematian Penyelamatan Hutan	20
	<b>V.</b>	<b>EDITORIAL</b>	
		Christmas: Do not be afraid	21
		Melucuti dengan Tegas Semua Rekening Liar	22

Jakarta, 24 Desember 2008  
Sub Direktorat Berita  
Direktorat Informasi dan Media

## I. INTERNASIONAL :

### 1. INDONESIA-MALAYSIA EPG Usulkan Satgas "Pati"

Pertemuan tokoh-tokoh terkemuka atau Eminent Person Group (EPG) Indonesia-Malaysia sepakat memberikan rekomendasi kepada masing-masing kepala pemerintahan untuk membentuk satuan tugas (satgas) yang menangani masalah pendatang asing ilegal (pati).

"Satgas ini beranggotakan unsur pemerintah seperti imigrasi dan NGO (LSM) dari kedua negara," kata Ketua EPG Malaysia Musa Hitam, didampingi ketua EPG Indonesia Try Sutrisno, dalam jumpa pers di Cyberjaya, Selangor, Selasa sore.

Tujuan pembentukan satgas ini, tambah Try Sutrisno, agar penanganan masalah pendatang ilegal di Malaysia bisa lebih efektif. EPG Indonesia-Malaysia mengadakan pertemuan terakhir di Cyberjaya, 22-23 Desember 2008.

Mereka sudah melakukan finalisasi rekomendasi atas berbagai masalah yang menyangkut hubungan kedua negara bertetangga serumpun untuk diberikan kepada kepala pemerintahan masing-masing.

"Rekomendasi yang diberikan kepada kepala pemerintahan Indonesia sama dengan yang diberikan kepada kepala pemerintahan Malaysia. Rekomendasi akan diserahkan kepada masing-masing kepala negara pada Januari 2009," kata Try.

Menurut juru bicara EGP Indonesia, Musni Umar, dari berbagai pertemuan mereka telah membahas berbagai isu misalkan tenaga kerja, imigrasi, pendidikan, media, dan politik. "Intinya adalah melihat berbagai isu dari pendekatan people to people," katanya.

Dari berbagai pertemuan dan dialog, lanjut dia, dijumpai ada banyak salah paham, salah persepsi, saling curiga dan saling tidak percaya antara masyarakat Indonesia-Malaysia.

Salah satu penyebabnya ialah adanya kesenjangan generasi. Banyak generasi muda yang kurang memahami sejarah hubungan Indonesia-Malaysia dan begitu kuatnya hubungan masyarakat kedua negara yang mempunyai banyak kesamaan agama, bahasa, dan budaya.

"Generasi muda kedua negara saat ini melihat seolah-olah tidak ada hubungan erat dan baik antara Indonesia-Malaysia pada masa lampau, padahal sebaliknya sangat erat dan dekat," katanya.

Oleh sebab itu, kedua EPG dapat merumuskan hasil-hasil pertemuan kemudian menyerahkan rekomendasi yang sama kepada masing-masing kepala pemerintahan.

Indonesia-Malaysia pada awal tahun 2008 sepakat membentuk EPG untuk memberikan masukan bagaimana kedua masyarakat saling erat, bersahabat dan makin meningkat rasa persaudaraannya.

Hasil pertemuan EPG ini kemudian diberikan kepada masing-masing kepala pemerintahan. Jika rekomendasi diberikan pada Januari 2009 maka dalam waktu hampir satu tahun usianya, EPG sudah bisa menghasilkan rekomendasi.

#### **4.750 Orang**

Sementara itu, sedikitnya 4.750 pekerja di Malaysia akan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh 137 perusahaan dalam tiga bulan mendatang.

Sebagian besar PHK berasal dari sektor elektronika," kata Menteri Sumber Daya Manusia (SDN) S Subramaniam seperti dikutip surat kabar The Star. Data itu termasuk PHK terhadap 1.500 staf oleh produsen disk drive komputer Western Digital baru-baru ini. "Pemerintah akan melatih kembali korban PHK atau membantu mereka memperoleh pekerjaan baru," kata menteri.

Perdagangan Malaysia menunjukkan ekonomi sedang kehilangan penyangga utamanya karena melemahnya penjualan global dan jatuhnya harga komoditas yang memukul ekspor.

Ekspor Malaysia secara tak terduga turun 2,6 persen pada Oktober dibanding periode yang sama setahun lalu, di bawah ekspektasi para ekonom naik 6,3 persen. (Suara Karya)

## **2. Putin: Krisis finansial naikkan harga gas alam**

Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin mengatakan krisis finansial global dan kenaikan biaya eksplorasi dapat mengakibatkan kenaikan harga gas alam.

"Biaya eksplorasi, produksi gas alam, dan transportasi terus naik, ini artinya biaya pengembangan industri juga akan melambung tinggi," ujarnya.

Putin menambahkan era sumber energi murah dan gas murah sudah akan berakhir.

Hal ini disampaikan Putin saat berbicara dalam pertemuan dengan sejumlah pengeksport gas yang digelar di Moskow.

Pertemuan ini bertujuan meningkatkan kerja sama di tengah kecemasan negara-negara pengimpor gas terhadap kemungkinan perubahan menjadi model kartel seperti yang diterapkan pada organisasi negara-negara pengeksport minyak (OPEC).

Sekitar 12 negara penghasil gas dari seluruh dunia, yang dikenal dengan Forum Negara-Negara Pengeksport Gas, berencana untuk menandatangani kesepakatan bersama dalam pertemuan ini.

Forum ini telah menggelar pertemuan rutin sejak 2001. Meski demikian forum ini tidak mengenal keanggotaan dan manajemen.

Awal tahun ini, Rusia, Iran, dan Qatar, yang merepresentasikan hampir sepertiga dari total ekspor gas alam telah menyetujui apa yang disebut "gas troika" untuk eksplorasi dan produksi bersama. (Bisnis Indonesia)

## **3. China Harapkan India-Pakistan Kedepankan Dialog**

Pemerintah China minta kepada India dan Pakistan untuk mengedepankan dialog dan konsultasi dalam menangani kasus ledakan bom di Mumbai yang terjadi beberapa bulan lalu.

"Kami mengharapkan kedua negara tersebut bisa tetap menjaga hubungan dengan baik, serta mengedepankan dialog dan konsultasi konstruktif dalam menangani kasus Mumbai," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Qin Gang dalam keterangan pers berkala, di Beijing, Selasa (23/12).

Menurutnya, sebagai dua negara bertetangga termasuk dengan China stabilitas dan keamanan merupakan prioritas yang harus dikedepankan sehingga menciptakan suatu wilayah yang damai.

Adanya ledakan yang terjadi di Mumbai dan menewaskan ratusan jiwa itu, termasuk diantaranya, warga asing membuat pemerintah China mengutuk serangan itu.

"Kami mengutuk serangan itu dan menyatakan duka cita mendalam kepada korban atas terjadinya kasus itu," kata Qin Gang.

Terkait adanya ledakan itu, ia sekali lagi menegaskan bahwa India dan Pakistan hendaknya menghindari konflik berkepanjangan serta mengedepankan dialog untuk mencari solusi secepatnya.

Hubungan India dan Pakistan semakin memanas setelah terjadinya ledakan di Mumbai itu, ketika masing-masing negara menuduh dalang dibalik kejadian itu.

Sebuah kelompok tak dikenal yang menamakan diri Deccan Mujahedeem mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu, dan seorang bersenjata mengatakan kepada saluran televisi India melalui telepon bahwa mereka berasal dari India dan melakukan serangan itu karena perlakuan terhadap muslim India.

Namun, para pejabat India menuduh serangan itu dilakukan oleh kelompok dukungan Pakistan, Lashkar-e-Taiba, yang terkenal karena serangan terhadap parlemen India pada 2001. Namun, juru bicara Lashkar membantah terlibat dalam serangan tersebut.

Serangan-serangan Mumbai itu juga telah menimbulkan ketegangan antara India dan Pakistan. India mengatakan bahwa seluruh 10 orang bersenjata yang melakukan serangan itu datang dari Pakistan. New Delhi telah memberi Islamabad daftar 20 tersangka teroris dan menuntut penangkapan serta ekstradisi mereka.

India dan Pakistan terlibat dalam tiga perang dan hampir terjerumus ke dalam perang keempat setelah serangan militan pada 2001 terhadap gedung parlemen India.

Dua dari tiga perang itu meletus karena masalah Kashmir. Laporan-laporan terakhir intelijen India menunjukkan kenaikan tajam dalam upaya penyusupan militan melewati garis pengawasan yang dibantu pasukan perbatasan Pakistan. (Jurnal Nasional)

#### **4. Malaysia Cari Investor Jembatan Selat Malaka**

Wakil PM Malaysia Najib Tun Razak mengatakan, usul pembangunan sebuah jembatan yang melintasi Selat Melaka dan menghubungkan Malaka dengan Sumatera memerlukan kajian teliti dan menyeluruh.

Menurut Najib, salah satu yang perlu dikaji ialah biaya pembangunan jembatan itu yang diperkirakan menelan biaya 11 miliar dollar AS, demikian menurut media massa Malaysia, Rabu (24/12).

Ia mengatakan hal itu menanggapi usul yang muncul pada konvensi dunia Melayu dan dunia Islam (DMDI) diikuti sekitar 1.000 peserta dari 13 negara termasuk enam gubernur Sumatera yang hadir disana.

Presiden DMDI sekaligus Menteri Besar (Gubernur) Malaka Mohd Ali mengatakan, pembangunan jembatan di Selat Malaka sepanjang 52 km akan menjadi jembatan terpanjang di dunia dan dampak pembangunan itu ialah pembangunan sosial ekonomi di kedua belah pihak.

"Kita perlu mengkaji secara menyeluruh dan kemudian dikemukakan kepada kedua pemerintah. Kita harus melihat apakah biayanya bisa diterima dan bagaimana dari sisi pemasukan," kata Mohd Ali.

Ia mengatakan sedang mencari investor asing untuk membiayai pembangunan proyek mega tersebut. Najib mengusulkan sebagai permulaan agar kedua wilayah itu dihubungkan dengan kapal feri antara Kuala Tinggi dengan Dumai (Sumatera). (Kompas)

#### **5. Krisis Global Industri Masuki Masa Suram, Gaji Tak Dibayar**

Industri alat berat dunia kini menghadapi masa suram. Setidaknya, akan terjadi pengurangan 25 juta pekerja akibat kurangnya permintaan. Perusahaan Amerika Serikat pembuat alat-alat berat, seperti Caterpillar, mengakui sedang memasuki masa sulit.

Pihak Caterpillar mengatakan sedang melakukan perampingan karyawan, mengurangi kegiatan, serta menurunkan gaji karyawan.

Berita ini muncul setelah industri raksasa otomotif Jepang, Toyota, juga memberikan proyeksi terburuk selama 70 tahun terakhir.

Toyota, perusahaan otomotif raksasa Jepang, memperkirakan akan mengalami kerugian operasional untuk pertama kalinya dalam 70 tahun. Kerugian ini karena penjualan mobil anjlok di seluruh dunia.

Manajemen Toyota menyatakan akan mengalami kerugian sebesar 150 miliar yen atau 1,66 miliar dollar AS untuk tahun fiskal yang berakhir pada Maret 2009.

Penurunan penjualan mobil yang terjadi pada Toyota di pasar utama Toyota, yaitu AS, menimbulkan pertanyaan apakah Toyota akan menyentuh titik nadir.

"Kesulitan ini menyeret kita lebih cepat, lebih luas, dan lebih dalam daripada perkiraan semula. Ini adalah krisis yang tidak dapat dihindari dan memerlukan tindakan segera," ujar Presiden Toyota Katsuaki Watanabe.

Toyota juga dikabarkan akan mengangkat Akio Toyoda, anak mantan Presiden Toyota Shoichiro Toyoda dan cucu pendiri Toyota, untuk menggantikan Watanabe. Selama bertahun-tahun, Toyoda telah menjadi kandidat posisi itu. Akan tetapi, Watanabe mengatakan, saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk melakukan pergantian kepemimpinan di Toyota.

#### **Tak bisa bayar gaji**

Isi berita diluar tanggungjawab Direktorat Infomed, Deplu

Ini adalah berita suram di samping kesulitan yang sudah melanda perusahaan otomotif AS, General Motors, Chrysler, dan Ford.

Industri otomotif Perancis juga menghadapi masalah serupa. Presiden Perancis Nicolas Sarkozy, Selasa, saat berada di Rio de Janeiro, Brasil, mengatakan terpaksa mengulurkan tangan untuk menolong industri otomotif yang sedang kesulitan. Tidak disebutkan bentuk pertolongan yang dimaksudkan.

Akan tetapi, dari Seoul, Korea Selatan, diberitakan, raksasa otomotif Perancis, Renault, cabang Korea Selatan untuk sementara menutup unit-unit bisnisnya. Renault Samsung mengatakan, semua aktivitas perakitan di pabrik mereka yang ada di kota pelabuhan Busan akan dihentikan setidaknya untuk delapan hari.

Raksasa-raksasa otomotif Korea Selatan lainnya, termasuk Hyundai Motor, juga mulai mengurangi kegiatan pembuatan mobil karena turunnya permintaan dari dalam dan luar negeri.

Ssangyong Motor, perusahaan otomotif Korea Selatan, Senin, menyatakan sudah tidak bisa membayarkan gaji karyawan tepat waktu pada Desember ini. Perusahaan kekurangan uang tunai karena seretnya penjualan mobil. (Kompas)

I I .

## **NASIONAL :**

### **A. POLITIK :**

#### **1. Political surveys top commodity for 2009**

Political surveys have become a lucrative business ahead of next year's elections with reputable marketing firm Markplus Inc. putting its recent study on voters' behavior up for sale to political parties.

Markplus, owned by marketing guru Hermawan Kartajaya, set up the Indonesian Political Marketing Research (IPMR) to conduct political surveys on a regular basis ahead of the 2009 elections.

IPMR executive director Taufik said Tuesday the software, which contains the results of its recent survey, would be sold for Rp 2.2 billion (US\$197,309).

"With the software, the parties and legislative candidates can map voters' behavior in each election district across the country," he said.

The survey examined, among other aspects, the popularity, acceptability and electability of political parties and presidential candidates among the respondents.

It also assessed how likely certain legislative candidates were of winning seats in electoral districts.

The IPMR conducted its first-ever survey in November of 16,800 respondents representing all 77 electoral districts in 33 provinces, with a margin error estimated at 0.75 percent.

Taufik said the survey cost Rp 3 billion.

Pollsters are often reluctant to disclose the budget for their surveys.

Political communication expert Effendy Ghazali hailed this method of marketing election surveys that Markplus had pioneered.

"This will be the first company that has sold election survey results to the political parties. There is a big market for it," he said.

Effendy said he regretted the fact that many election pollsters refused to unveil the sponsors behind their surveys.

"It would be good for survey companies to disclose their financial backers to ensure the objectivity of their results."

At a national level, the IPMR surprised political commentators when it announced former Army Strategic Reserve Command chief Prabowo Subianto was the second most popular presidential candidate after the incumbent, President Susilo Bambang Yudhoyono. Megawati Soekarnoputri was third.

As the presidential election law requires a candidate to win the support of a party or coalition with either 20 percent of seats in the House of Representatives or 25 percent of the

popular vote, Taufik said only Yudhoyono and Megawati stood a real chance of contesting the election.

Yudhoyono is the chief patron of the Democratic Party, while Megawati leads the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P), which finished second to the Golkar Party in the 2004 legislative election.

Prabowo, founder of the Great Indonesian Movement (Gerindra), is the most popular alternative candidate.

Golkar leader Jusuf Kalla is the most popular vice presidential aspirant, followed by House speaker Agung Laksono and People's Consultative Assembly speaker Hidayat Nurwahid, according to the survey.

The survey showed that in terms of political parties Golkar was the top choice of most respondents, followed by the PDI-P.

Gerindra has exceeded the popularity of more senior parties like the Prosperous Justice Party (PKS) and Unity Development Party (PPP). (The Jakarta Post)

## **2. Media Massa Harus Independen Pada Pemilu 2009**

Wakil Ketua Dewan Pers Leo Batubara mendesak media massa agar tetap teguh memegang prinsip independensinya dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2009 mendatang.

"Media massa harus memahami ketentuan independensi dalam Pemilu 2009, karena bila tidak netral maka media melanggar UU Pemilu dan bisa didenda," kata Leo Batubara dalam diskusi tentang Peran DPRD dan Pers dalam Pemilu 2009 di Jakarta, 22 Desember 2008.

Selain memahami makna independensi, ujar Leo, media massa juga harus memastikan agar para wartawannya tetap mematuhi kode etik jurnalistik dalam melakukan peliputan dalam pemilu.

Ia menyangkan, masih terdapat media massa yang siap "melacurkan" diri untuk menulis berbagai berita yang tidak netral dan condong terhadap politisi yang membayar atau memberikan dana kepada media tersebut.

"Pers harus memegang teguh moto 'maju tidak gentar membela yang benar' dan bukannya moto 'maju tidak gentar membela yang bayar'," kata Cosmas

Selain itu, ujar dia, media massa juga harus fokus dalam merekam jejak parpol dan caleg agar warga masyarakat dapat memperoleh informasi yang memadai sehingga tidak terjebak dalam perilaku "memilih kucing dalam karung".

Leo yang kerap bersuara dengan nada tegas itu juga memaparkan, saat ini terdapat sekitar 1.000 media cetak, 2.000 media radio, dan 200 media televisi yang tersebar di berbagai daerah di Tanah Air.

Mengenai iklan parpol yang terpampang di beragam media, ia mengemukakan, iklan bernuansa pemilu tersebut juga berpengaruh terhadap para pemilih yang akan menentukan pilihan pada Pemilu 2009 mendatang.

"Iklan sangat mempengaruhi pemilih," katanya. Leo mencontohkan, kemenangan Barack Obama dalam pemilu kepresidenan di Amerika Serikat juga sangat terbantu dengan iklan yang dilakukannya di sejumlah media termasuk internet.

Selain itu, ujar dia, pihak lawan Obama yang melakukan iklan yang menjelek-jelekkan atau memfitnah Presiden AS berkulit hitam pertama itu juga menumbuhkan simpati di sejumlah kalangan pemilih.

"Mereka yang tidak suka iklan 'black campaign' tersebut, malah ingin menolong Obama," kata lelaki berkacamata itu.

Namun, lanjutnya, yang paling penting bagi sebuah parpol bukanlah seberapa banyak iklan di media, tetapi apakah kapasitas calon yang ditawarkan parpol tersebut benar-benar berkualitas atau tidak. (Republika)

## **3. Court hands power back to voters**

Democracy looks certain to prevail in next year's legislative election after the Constitutional Court ruled on Tuesday that seats in the nation's legislatures would go to the candidates who secured the most votes.

The court unanimously agreed to revoke two articles in the 2008 election law concerning the way legislative seats are distributed. The annulled articles would have allowed political party

leaders to handpick their close supporters to represent the parties in the national and regional legislatures, rather than the seats going to the individual candidates who win the most votes.

"The philosophical basis of every election is that it be determined by the number of votes won.

Therefore, the election of legislative candidates must follow that rule, rather than the numerical order decided in advance," said the panel of judges, presided over by court chief Moh. Mahfud MD.

Factions at the House of Representatives endorsed the election bill in March of this year. Under the law, legislative seats are distributed first to candidates who secure at least 30 percent of the original vote. The rest of the seats are then allocated according to the list of permanent legislative candidates submitted by the political parties.

Four legislative candidates from the Indonesian Democratic Party for Struggle (PDI-P) filed for a judicial review of the law, on the grounds the system was unfair.

The court said the law breached the principles of representative democracy and failed to respect voters' choices.

"Given that Indonesia adopts a system of direct election for the president and vice president, it will be fair if members of the House of Representatives and Regional Representatives Council are those who are directly elected by the people," the court said.

Chairman of the Prosperous Justice Party (PKS), Tifatul Sembiring, welcomed the court's ruling, which he said was in line with his party's policy.

"We were one of the parties that proposed the election of candidates based on the number of votes gained, but the major parties rejected it," he said. "The new election system will force candidates to work hard to woo voters."

Tifatul said the Muslim-based party would have no difficulty adjusting to the court ruling.

"However, we will wait for the General Elections Commission (KPU) to implement the new policy and draft operational regulations," he said.

Golkar Party deputy chairman Firman Subagyo said the court's ruling came at the right time as the 2009 legislative election drew closer.

"This will only strengthen Golkar's strategy since we have adopted this election (system) internally in response to unfairness felt by our legislative candidates," he said.

He said most of the incumbent legislative members, including those from Golkar, were more the representatives of their political parties than of the people.

"People used to choose legislative candidates through their parties, but with this ruling, people will select (individual) candidates of their own choice," he said.

Golkar introduced the popular vote mechanism, but suspended it after the KPU warned the policy contravened the election law.

He added that this would force political machines to become more dynamic because the system would encourage individual candidates to promote themselves to voters. (The Jakarta Post)

## **B. EKONOMI**

:

### **1. Turunnya Harga Minyak Dunia Tak Banyak Pengaruhi Penerimaan Negara**

Penurunan harga minyak yang terjadi akhir-akhir ini diperkirakan tidak akan banyak berpengaruh terhadap penerimaan negara selama 2008.

"Kalau 2008 tak ada pengaruhnya karena perhitungan 2008 untuk penerimaan pada Desember kan dihitung berdasar realisasi Nopember, sehingga praktis tidak ada pengaruhnya," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Depkeu (BKF), Anggito Abimanyu, di Jakarta, Selasa malam.

Sementara untuk belanja negara, Anggito mengatakan memang ada pengaruh signifikan terutama pada belanja subsidi yang menurun.

"Kalau untuk belanja memang ada pengaruhnya untuk bulan Desember, tapi kan dalam arti positif karena subsidiya turun," jelasnya.

Ia menyebutkan, pada saatnya nanti pemerintah akan menghitung kembali besaran-besaran dalam APBN baik yang menyangkut penerimaan pajak dan non pajak, belanja negara, dan pembiayaan defisit selama 2008.

Mengenai pengaruh ke APBN 2009, Anggito mengatakan, pemerintah baru akan melihat perkembangan yang terjadi pada Januari 2009.

"Nanti kita lihat pada Januari, akan ditung kembali seluruh postur APBN kita di awal tahun," katanya.

Menanggapi adanya perkiraan penerimaan pajak pada 2009 akan turun sekitar 10 persen dari target sehingga defisit juga meningkat, Anggito mengatakan, pemerintah akan menghitung adanya kemungkinan itu.

"Karena ini kan dinamis, harus juga diperhatikan berbagai hal seperti bagaimana proyeksi pertumbuhan ekonomi 2009, inflasi, tingkat konsumsi dan lainnya," katanya.

Menurut dia, jika inflasi turun maka suku bunga bisa turun sehingga konsumsi atau daya beli masyarakat tetap tinggi sehingga bisa menolong tercapainya target penerimaan PPN, cukai, dan lainnya.

Sementara itu, Meneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta menyatakan optimismenya bahwa pertumbuhan ekonomi selama 2008 akan mencapai di atas 6 persen.

"Ini karena rata-rata pertumbuhan ekonomi selama beberapa triwulan 2008 sudah mencapai sekitar 6,3-6,4%. Berarti di akhir Desember akan di atas 6 persen," katanya.

Ia mengakui adanya perlambatan ekonomi global yang berpengaruh kepada Indonesia namun hal itu tidak terjadi pada seluruh tahun 2008.

"Memang ada perlambatan tetapi di tiga kuartal pertama, kita di atas 6 persen, angka kemiskinan juga turun pada 2008 tapi nanti angka tahunan akan dihitung pada Maret 2009," katanya. (Antara)

## **2. Komoditas anjlok, harga emas jatuh**

Harga emas jatuh terkait spekulasi bahwa kemerosotan harga komoditas bakal membayangi permintaan logam berharga sebagai pelindung nilai terhadap inflasi. Sementara perak dan platina juga merosot.

Indeks Reuters/Jefferies CRB yang terdiri atas 19 bahan mentah turun untuk lima sesi berturut-turut, bersiap mencatatkan penurunan tahunan terbesar sepanjang sejarah. Minyak mentah, bensin, jagung, kacang kedelai, gandum, dan tembaga tumbang dari rekor tertinggi 2008. Emas mencatatkan penurunan 19% dari rekor tertinggi sepanjang sejarah di US\$1.033,90 per ounce di Maret.

"Tekanan inflasi mulai melemah, dan hal tersebut memberi tekanan pada emas," kata Matt Zeman, pedagang logam di LaSalle Futures Group, Chicago.

Kontrak berjangka emas untuk pengiriman Februari melorot US\$9,10 atau 1,1% menjadi US\$838,10 per ounce di divisi Comex, New York Mercantile Exchange. Harga tersebut mencatat pergeseran tipis tahun ini.

Kontrak perak untuk pengiriman Maret tergelincir 60 sen, atau 5,5%, menjadi US\$10,26 per ounce di Comex, yang merupakan kemerosotan terbesar sejak 1 Desember. Kontrak teraktif tersebut mencatat penurunan 31% tahun ini.

Sementara itu, kontrak platina untuk pengiriman April anjlok US\$10,70, atau 1,2%, menjadi US\$850,50 per ounce di Nymex. Palladium untuk pengiriman Maret bergerak tipis di US\$174,70 per ounce.

Emas mencatat rally 31% tahun lalu setelah inflasi melonjak dengan laju tercepat dalam waktu hampir dua dekade terakhir. Harga konsumen merosot 1,7% di November, terbesar sepanjang sejarah, setelah harga energi anjlok. Kontrak minyak mentah mencatatkan penurunan 73% hingga kurang dari US\$40 per barel di New York dari rekor tertinggi US\$147,27 di bulan Juli.

Namun demikian, emas masih diperkirakan akan rebound apabila resesi yang memburuk mendongkrak permintaan terhadap logam tersebut sebagai tempat berlindung, kata Tom Pawlicki, analis di MF Global Ltd., Chicago.

"Masih ada sekelompok pedagang yang cemas bahwa resesi akan berubah menjadi depresi," kata Pawlicki. "Mereka menggunakan emas sebagai sumber perlindungan."

A.S. terjerumus ke dalam resesi pada Desember 2007, menurut National Bureau of Economic Research di Cambridge, Massachusetts.

Platina diperkirakan mengalami rally apabila langkah penyelamatan General Motors Corp dan Chrysler LLC oleh pemerintah berhasil mencegah ambruknya industri otomotif A.S. Baik

platina maupun palladium digunakan untuk membuat perangkat pengendali polusi di dalam mobil dan truk.

"Platina merupakan pasar yang berdasarkan pada kesehatan dari industri otomotif," kata Pawlicki.

Platina mencatatkan kemerosotan sebesar 44% tahun ini. Harganya menyentuh rekor tertinggi US\$2.308,80 di bulan Maret. Sementara palladium mencatat kemerosotan 54% sepanjang tahun 2008. (Bisnis Indonesia)

### **3. Latest phase of NSW online service introduced to help traders**

The government launched Tuesday the third phase of the National Single Window (NSW), an online service for importers and exporters that could help businesses cope with the global economic downturn.

This latest phase of the NSW, aimed at streamlining the flow of exports and imports and preventing smuggling, includes Tanjung Perak Port in Surabaya, Belawan Port in Medan and Soekarno-Hatta International Airport in Tangerang. They will join Tanjung Priok Port in Jakarta and Tanjung Emas Port in Semarang.

All importers and customs brokers at Tanjung Priok and Tanjung Emas must comply with the NSW, under the latest implementation.

Prior to this, only 146 importers benefited from the NSW, selected based on their record in adhering to port regulations.

This figure "rises to 4,852 'active' importers", out of 18,737 registered importers at the five ports, Finance Minister Sri Mulyani Indrawati said. There are about 600 customs brokers.

"The 'inactive' importers may be illegal or hit-and-run importers," she added. Mulyani said with the NSW, business costs could go down because companies would deal exclusively with an NSW team, rather than pay illegal fees to port officials.

"The NSW can reduce the cost of doing business, which will ease business spending. With a cut in business costs, businesses will have the capacity to keep their hired employees," she said.

Gunawan Setiadi, treasurer of the Priority Lanes Companies Association (APJP), said he expected the NSW to benefit exporters too, with many businesses using imported goods for export.

Exporters can make use of the NSW too, but only temporarily, at Tanjung Priok, said Susiwijono, the technical head of the NSW preparation team.

"We will hold a technical test for exports through the NSW next month," he said, adding 70 percent of chosen exporters had been recommended by the Trade Ministry, and the rest by the Forestry Ministry.

This year, the Directorate General of Customs and Excise checked 735,444 documents at the five ports, 64 percent of which were sent through the NSW.

About 70 percent of all imports to Indonesia go through Tanjung Priok Port. Regarding the implementation of the NSW at Soekarno-Hatta airport, Susiwijono said the preparation team would check flight schedules, cargo handling information and weather forecasts to ensure the speedy flow of goods.

Anwar Suprijadi, director general of customs and excise, said the flow of goods through airports was much quicker than through seaports, making the business process more difficult. In 2009, the government is set to integrate the NSW with the ASEAN Single Window (ASW), comprising Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand. Other ASEAN countries — Laos, Cambodia, Myanmar and Vietnam — must join the ASW by 2012 at the latest. The ASW is part of the 2015 ASEAN Economic Community.

#### **Authorities involved in the NSW:**

1. Directorate General of Customs and Excise
2. Food and Drug Monitoring Agency
3. Directorate General of International Trade
4. Agriculture Quarantine Agency
5. Fish Quarantine Center
6. Health Ministry
7. Directorate General of Post and Telecommunications

8. Nuclear Energy Regulatory Agency
9. Agriculture Ministry
10. Industry Ministry
11. Energy and Mineral Resources Ministry
12. Forestry Ministry
13. Office of the State Minister for the Environment
14. National Police
15. Defense Ministry

Source: *NSW Preparation Team* (The Jakarta Post)

## C. SOSBUD :

### 1. Joop Ave: Sektor Pariwisata 2009 Penuh Tantangan

Mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar) Joop Ave berharap semua pemangku kepentingan dalam industri pariwisata mulai dari pemerintah, pelaku bisnis, hingga masyarakat bekerjasama memajukan pariwisata dalam negeri.

"Tahun 2008 pencapaian target-target industri pariwisata masuk kategori bagus, namun tahun depan (2009) tantangan akan semakin berat karena akan penuh tantangan," ujar Joop Ave saat memberi sambutan pada acara Malam Apresiasi Visit Indonesia Year 2008, di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Selasa.

Di hadapan Menbudpar Jero Wacik, jajaran pejabat di lingkungan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, pelaku usaha pariwisata termasuk pimpinan media massa, Joop menjelaskan, bahwa industri pariwisata merupakan sektor yang secara tidak langsung paling banyak menyerap tenaga kerja.

"Jangan hanya mengungkapkan berapa jumlah wisman yang datang dan devisa yang masuk. Tetapi yang paling penting dari itu adalah berapa jumlah penduduk yang hidupnya langsung atau tidak bergantung pada industri ini," ujar Joop.

Ia menjelaskan, industri pariwisata merupakan salah satu penyumbang terbesar terhadap pendapatan negara dan menjadi sektor yang bisa menciptakan lapangan kerja tidak terhingga jumlahnya.

"Dengan demikian sektor pariwisata bukan hanya tanggungjawab departemen saja, tetapi semua pihak yang terlibat di dalamnya harus," tegasnya.

Pada kesempatan itu, ia menjelaskan bahwa penilaiannya terhadap kinerja pemerintah utamanya Depbudpar dalam mengembangkan industri pariwisata juga merupakan mewakili pemikiran tiga mantan menteri kebudayaan dan pariwisata sebelumnya, yaitu Marzuki Usman, Abdul Latif, dan I Gede Ardhika.

Menurut catatan, sektor pariwisata tahun 2008 mencatat dua rekor baru yaitu jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan perolehan devisa.

Jumlah wisman ke Indonesia hingga akhir 2008 diperkirakan mencapai 6.433.507 orang, naik 16,85 persen dibanding tahun 2007 sebanyak 5,5 juta orang.

Saat yang sama, sisi penerimaan devisa pariwisata pada 2008 juga mencapai rekor sekitar 7,65 miliar dolar AS, lebih tinggi dari pencapaian tertinggi tahun 2000 senilai 5,74 miliar dolar AS.

Untuk tahun 2009, Depbudpar menargetkan jumlah wisman sebanyak 6,5 juta orang.

Menanggapi hal itu, Joop mengatakan, target VIY 2008 adalah tujuh juta wisman, namun hingga akhir tahun hanya mencapai 6,4 juta orang.

"Namun, jika seperti dalam rapor target tujuh juta itu dianggap angka sepuluh maka nilai rapor tahun 2008 adalah 8,5," kata Joop, yang disambut tepuk tangan para hadirin.

Untuk itu diutarakannya, program-program VIY 2008 sudah sepenuhnya dilanjutkan pada tahun mendatang.

Seakan memberi resep, Joop dengan serius menyampaikan bahwa satu hal yang paling penting dalam memajukan industri pariwisata adalah menggalakkan sadar wisata terhadap seluruh masyarakat.

"Harus diingat bahwa yang dapat memajukan industri adalah bangsa kita sendiri, tidak bangsa lain. Jadi kunjungilah negerimu sendiri," ujarnya.

## Penghargaan

Sementara itu, Menbudpar Jero Wacik mengakui bahwa tahun 2009 merupakan masa sulit bagi industri pariwisata terkait kemungkinan dampak krisis keuangan global berimbas pada pasar wisata dalam negeri. Ia mengakui penilaian dari berbagai pihak termasuk Joop Ave sebagai mantan Menbudpar merupakan masukan berharga demi membangun industri pariwisata.

Termasuk pencangangan VIY 2008, menurut Wacik, merupakan hasil rebusan semua pemangku kepentingan industri pariwisata.

"Semula banyak nada pesimis karena sebelum memulai program VIY ini banyak yang harus dibenahi mulai bandara, imigrasi, maskapai penerbangan, hingga kondisi keamanan. Akan tetapi setelah berjalan dan didukung penuh semua pihak VIY 2008 mendapat penilaian berhasil," ujar Wacik.

Untuk itulah diutarakan Wacik, sudah saatnya Depbudpar memberi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada beberapa pihak yang berpartisipasi membangkitkan industri pariwisata saat ini dan diharapkan memberi kontribusi ke depan.

Apresiasi diberikan berdasarkan empat kategori yaitu maskapai penerbangan, asosiasi pelaku bisnis pariwisata, industri dan perorangan, dan media massa.

Untuk kategori penerbangan, penghargaan diberikan antara lain kepada Garuda Indonesia, Air Asia, Silk Air, Lion Air, dan Emirates.

Kategori asosiasi diberikan antara lain kepada Bali Tourism Board, Westin Resort Bali, Nusa Dua Group, Batam Tourism Board.

Kategori industri/perorangan yang mewakili beberapa bidang, meliputi Hermarwan Kartawijaya (pakar pemasaran), Jaya Suprana (pendiri MURI), Andri Subono (promotor musik), Putu Wijaya (seniman), Dwiki Dharmawan (seniman).

Sementara penghargaan bagi media massa diberikan kepada TVRI, Metro TV, TV One, Trans TV, The Jakarta Post, dan Jakarta Globe. (Antara)

## 2. Religious freedom, tolerance in jeopardy

Indonesia has suffered major setbacks in upholding religious freedom and tolerance, enshrined in the Constitution, as evident in a series of attacks on pluralism, a year-end discussion heard Tuesday.

Worse, the government, through its own policies, has seemingly given carte blanche to hard-line groups to flourish and attack minority groups they deem "deviant", Pramono Tantowi, director of the Center of Religious and Civilization Studies, told the forum held at the headquarters of Muhammadiyah, the country's second largest Muslim organization.

Pramono said a joint ministerial decree, issued earlier this year, banning the Ahmadiyah Islamic sect from spreading its teachings, showed the government's support for violence in the name of religion at the expense of minority groups.

"The government has failed to protect its citizens. It should have acted as a mediator that stands above all parties and protects individuals' right to exercise their freedom of religion," Pramono said.

He added the proliferation of radical groups this year indicated a worrying trend toward Islamic fundamentalism.

Political parties, he went on, had exacerbated the situation by siding with mainstream aspirations, for their own interests.

"The issue of fundamentalism has been exploited by political parties not only religious-based ones, but also nationalist ones, to woo voters ahead of the 2009 elections," he said.

He added some parties lacked the guts to go against the mainstream for fear of losing votes from the majority Muslims in the elections next year, as was evident in the passage of the anti-pornography bill, which moderate Muslims and human rights activists lambasted for curtailing pluralism.

With the elections drawing near, political parties will now reduce religious issues to political gimmicks, Pramono warned.

Muhammadiyah chairman Din Syamsuddin also expressed regret over the state's failure to tackle acts of violence committed by hard-line groups, calling it proof of the government's ignorance.

He cited an attack in June by the Islam Defenders Front on activists of the Alliance of Religious Freedom in Jakarta, despite a heavy security presence.

The University of Indonesia's Tamrin Amal Tomagola said the government had gone too far in meddling in religious issues, and called for a clear separation between the state and religious bodies.

He suggested the government dissolve the Religious Affairs Ministry and the Indonesian Ulema Council, calling both organizations forms of state intervention in the private matter of religious affairs.

Another speaker at the discussion, Kemala Candra Kirana, head of the National Commission on Women's Protection, highlighted the entrapment of women by dozens of government policies that she said discriminated against them.

She added the adoption of sharia-based ordinances in several areas, including a bylaw that criminalized women who went out alone at night or acted suspiciously, was an example of violence against women.

"This bylaw violates the basic principle of presumption of innocence," she said. (The Jakarta Post)

### **3. BNP2TKI Absen Ikuti Rakornas TKI**

KEKECEWAAN Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Erman Suparno terhadap Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2KI) semakin memuncak.

Badan di bawah kepemimpinan Jumhur Hidayat tersebut justru tidak hadir dalam Rakornas Kelembagaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN). Padahal, sebagai operator penempatan TKI, kedatangan BNP2TKI sangat diperlukan. "Operator kok belum datang. Saya tanya penanggung jawab dan kepala panitia, katanya sudah diundang dan ditelepon.

Ini sampai sekarang belum memberikan alasan kenapa tidak datang," ungkap Erman sesuai membuka rakornas di Jakarta kemarin. Menanggapi hal ini, M Jumhur Hidayat mengaku pihaknya tidak mendapat undangan mengikuti acara tersebut sehingga BNP2TKI tidak menghadiri acara rakornas itu. (Koran Sindo)

## **D. HANKAM :**

### **1. 50.000 Polisi Siap Amankan Natal**

Jakarta-Untuk mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru 2009, jajaran Polri menyiagakan sedikitnya 50.000 personel.

Mereka disiagakan di seluruh gereja di Indonesia. Khusus di Jakarta, terdapat sedikitnya 1.129 gereja yang mendapat penjagaan ekstraketat

Demikian penegasan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri melalui Juru Bicara Mabes Polri Irjen Abubakar Nataprawira yang dihubungi SH di Jakarta, Selasa (23/12) siang ini

"Untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru, personel Polri dibantu TNI. Personel telah diterjunkan pada H-2. Mereka akan melakukan penyisiran di tempat ibadah tersebut. Setiap umat kristiani yang akan melakukan perayaan Natal akan diperiksa ketika hendak masuk ke gereja," katanya

Abubakar meminta masyarakat tidak tersinggung dengan adanya pemeriksaan oleh anggota pada saat akan masuk ke gereja

"Pemeriksaan ini juga berlaku bagi setiap jemaah yang membawa kendaraan pribadi. Pemeriksaan ini juga akan dilakukan pada saat masuk ke tempat perbelanjaan, tempat rekreasi, dan hotel. Lalu, yang terpenting lagi, jangan lupa untuk membawa identitas diri," tegasnya lagi.

Dia menyebutkan, terkait pengamanan Natal dan Tahun Baru itu, Selasa (23/12) siang ini, digelar apel kesiapan Operasi Lilin 2008 yang melibatkan unsur Polri dan TNI. Operasi Lilin 2008 tidak hanya mengamankan tempat ibadah, tapi juga pusat perbelanjaan serta tempat rekreasi yang juga berada di seluruh Indonesia.

Direktur Lalu Lintas Mabes Polri Brigjen Djoko Susilo mengatakan bahwa anggota polisi lalu lintas (polantas) yang berada di masing-masing polda akan diterjunkan untuk mengamankan Operasi Lilin 2008 ini. Bantuan anggota polantas ini, diharapkan dapat melancarkan jalannya perayaan Natal.

### **DKI Jakarta**

Khusus di wilayah Ibu Kota Jakarta, Kepala Pelaksana Harian Humas Polda Metro Jaya, AKBP Mahbub yang ditemui SH, Senin (22/12) sore, mengatakan, dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru, pihaknya memberikan pengamanan ketat terhadap 1.129 gereja yang berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Selain ribuan gereja, objek vital lainnya, seperti 681 tempat perbelanjaan dan hiburan serta puluhan stasiun, terminal, bandara, dan pelabuhan, juga mendapat pengawasan ekstraketat

Ia mengatakan, jumlah gereja terbanyak berada di Jakarta Utara dengan total 192, disusul Jakarta Timur dengan 152 gereja dan Jakarta Pusat 157 bangunan. Beberapa tempat ibadah yang akan mendapat pengamanan ketat, di antaranya Gereja Katedral Jakarta Pusat, Gereja Immanuel yang berada di depan Stasiun Kereta Api (SKA) Gambir, serta Gereja HKBP Tebet.

Sementara itu, lokasi hiburan ataupun tempat perbelanjaan terbanyak berada di wilayah Jakarta Selatan dengan jumlah hampir separuh dari keseluruhan, yaitu sebanyak 301 lokasi. Jakarta Utara berada di urutan kedua dengan 131 lokasi, dan di Jakarta Pusat berjumlah 59 tempat hiburan dan mal.

Mengenai kekuatan pasukan yang bertugas mengamankan Malam Natal dan Tahun Baru di Ibu Kota, Mahbub jumlahnya berkisar dua per tiga dari jumlah keseluruhan anggota yang bertugas di bawah koordinasi Polda Metro Jaya, yaitu 18.000 personel. Mereka terdiri dari berbagai kesatuan, di antaranya Intel, Reserse, Densus 88 Antiteror hingga polantas yang tergabung dalam Operasi Lilin Jaya.

Dalam kesempatan berbeda, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Condro Kirono mengatakan, pihaknya menyiagakan puluhan unit kendaraan derek untuk mengantisipasi permasalahan banyaknya kendaraan yang diparkir secara sembarangan di tempat yang tidak diizinkan saat perayaan Tahun Baru 2009 mendatang.

"Beberapa lokasi akan ditetapkan sebagai daerah terlarang untuk parkir secara sembarangan, di antaranya di sepanjang Jl Jenderal Sudirman dan Jl MH Thamrin. Semua yang salah akan kita tilang," tegasnya.

### **Pengamanan di Daerah**

Dari Jayapura dilaporkan, sedikitnya 450 personel Polresta Jayapura disiagakan dalam pengamanan Malam Natal, mulai Rabu (24/12) besok. Kapolresta Jayapura AKBP Robert Djonso kepada SH mengatakan, 450 personel ini akan disiagakan di 11 gereja besar di Kota Jayapura.

"Pada Malam Natal dan misa Natal, Kamis (25/12), khusus gereja besar seperti Gereja GKI Paulus Dok V, Gereja Katolik Katedral dan Gereja GKI Pengharapan akan disterilisasi," katanya.

Pagi tadi, di Lapangan PTC Entrop digelar apel siaga gabungan TNI/Polri menjelang perayaan Natal dan Tahun baru. Selain itu juga ada partisipasi dari tujuh Organisasi Kesamaan Pemuda Islam (OKPI) Kota Jayapura yang akan bersama-sama dengan personel Polri melaksanakan pengamanan ibadah Natal.

Polresta Jayapura juga mengeluarkan larangan pada Malam Natal, yaitu larangan membunyikan petasan dan meriam bambu, yang cukup meresahkan warga Jayapura. Hal ini guna menjaga kekhusukan ibadah perayaan Natal bagi umat kristiani

Di Semarang, Jawa Tengah (Jateng), sebanyak 397 gereja mendapat penjagaan ketat mula

Selasa tengah malam atau Rabu (24/12) pukul 00.00 WIB. Menurut Kapolwiltabes Semarang Komisariss Besar Masjhudi, pada Senin (22/12) siang, pihaknya telah memerintahkan seluruh jajarannya untuk menjaga setiap gereja selama 24 jam penuh agar umat kristiani bisa merayakan Natal di gereja dengan tenang. "Itu sebagai langkahantisipasi terhadap kemungkinan terjadinya gangguan teror dan kamtibmas," ujarnya

Di Polwiltabes Semarang, ada sekitar 4.000 polisi yang akan terjun dalam pengamanan itu. Untuk wilayah yang dirasa kekurangan personel pengaman, polwil akan menyediakan bantuan kekuatan. "Kami juga akan berpatroli dan membagi zona pengamanan," ujar Masjhudi.

Pengamanan itu dilakukan dengan sistem terbuka dan tertutup, sesuai dengan kondisi yang ada. Untuk gereja yang dipandang besar dan mempunyai jemaat banyak, Polwiltabes akan memaksimalkan kekuatan. (Sinar Harapan)

## **E. HUKUM**

### **1. Corby Si "Ratu Mariyuana" Dapat Remisi Khusus Natal**

Schappelle Leigh Corby (30), narapidana warga negara Australia yang dihukum selama 20 tahun penjara akibat tersangkut kasus penyelundupan 4,2 kilogram mariyuana memperoleh pengurangan masa hukuman (remisi) khusus Hari Raya Natal selama satu bulan.

"Pengurangan masa hukuman tersebut akan diserahkan oleh Kepala Lapas Denpasar bersamaan dengan penyerahan remisi bagi napi lainnya yang beragama Nasrani," kata kata Kepala Bidang Registrasi Perawatan Bina Khusus Narkotika Kanwil Departemen Hukum dan HAM Propinsi Bali, Anak Agung Anom Suryadharmadi Denpasar Rabu.

Ia mengatakan, mantan mahasiswa Sekolah Terapi Kecantikan di Australia merupakan salah seorang dari delapan napi warga negara asing yang memperoleh pengurangan masa hukuman terkait dengan Hari Raya Natal.

Remisi yang diterima Corby kali ini merupakan yang ketiga, sebelumnya tahun 2006 sebesar dua bulan.

Namun pada HUT Ke-62 Kemerdekaan RI 17 Agustus 2007 gagal memperoleh remisi akibat melakukan kesalahan katagori berat, yakni memiliki, menyimpan dan menggunakan alat komunikasi telepon selular.

"Ratu Mariyuana" saat itu telah mengakui kesalahan dan langsung meminta maaf atas perbuatannya.

Corby diseret ke meja hijau, setelah mengaku sebagai orang yang membawa papan selancar di Bandara Ngurah Rai, Bali, 8 Oktober 2004 yang di dalamnya diketemukan 4,2 kilogram mariyuana.

Ia saat itu terbang dari Australia dengan menumpang pesawat Australia Airlines AQ 7829.

Sejak Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan vonis selama 20 tahun sejak pertengahan 2005 Corby tercatat beberapa kali pernah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah Denpasar karena sakit. (Antara)

### **2. UU BHP Permudah Pengusaha Kendalikan Pendidikan**

UNDANG-undang (UU) Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang baru disahkan beberapa hari lalu akan mempermudah para pemilik modal (pengusaha) untuk mengendalikan proses pendidikan.

Menurut Koordinator Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK) Malang Raya, Mohammad Taufiqurrahman, Selasa (23/12), masuknya para kapitalis dalam dunia pendidikan khususnya pendidikan tinggi akan berakibat pada mutu lulusan yang hanya siap kerja untuk mengabdikan pada kepentingan kapitalis.

"Mental mahasiswa yang terbentuk nantinyapun juga mental terjajah yang siap menjadi buruh intelektual tanpa berpikir bagaimana caranya menjadi seorang yang mandiri dan tidak tergantung kebutuhan pasar seperti yang diinginkan para pengusaha," katanya disela-sela aksi unjuk rasa menolak UU BHP di depan Balaikota Malang.

Kemudahan bagi pemilik modal untuk ikut masuk "mengurus" pendidikan yang dituangkan dalam UU BHP tersebut, katanya, sebagai imbas dari tereduksinya peran pemerintah dalam pengelolaan pendidikan yang secara perlahan diserahkan sepenuhnya pada masyarakat.

Ia menilai, UU BHP juga menganalogikan institusi pendidikan sebagai perusahaan yang memungkinkan mengalami pembubaran karena dinyatakan pailit. Bagaimana kualitas sumber daya manusia (SDM) bangsa Indonesia akan mampu bersaing jika pemerintah "lepas tangan" terhadap biaya pendidikan.

Selama ini, kata Taufiqurrahman, belum pernah dilakukan analisis fisibilitas dan analisis kemampuan dalam pendanaan serta pengelolaan pendidikan secara mandiri terhadap beberapa perguruan tinggi yang menjadi obyek dari BHP seperti UI, ITB, UGM dan IPB.

"Pelaksanaan BHP di beberapa kampus ternama ini bukan berarti tanpa masalah terutama soal pendanaan. Kalau bisa terpenuhi, mahasiswa yang menjadi korban karena biaya pendidikan tinggi semakin 'mencekik'," katanya menegaskan.

Sementara dalam tuntutan tertulisnya BKLDK menolak pengesahan UU BHP karena penuh dengan muatan kapitalisme liberalisme yang berbahaya bagi pendidikan serta mengajak intelektual untuk kritis dalam memikirkan nasib bangsa menuju Indonesia yang lebih baik dan bermartabat. (Jurnal Nasional)

### **3. Inilah Penyelenggara Negara Paling Korup**

Pejabat eselon dan pimpinan proyek menduduki peringkat pertama sebagai pegawai negeri/penyelenggara negara pelaku korupsi pada tahun 2008. Ini berdasarkan hasil penelitian Indonesia Corruption Watch tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2008.

"Perkara korupsi yang ditangani KPK berdasarkan pelaku, yang menduduki peringkat tertinggi dengan jumlah 22 orang dari 86 orang yang ditangani. Sementara urutan kedua yang paling banyak melakukan korupsi itu duta besar, pejabat konsulat, dan imigrasi, sebanyak 15 orang," ujar Wakil Koordinator ICW, Danang Widoyoko dalam presentasinya di diskusi terbuka "Refleksi Satu Tahun Kinerja KPK Jilid II" di Jakarta, Selasa (23/12).

Sedangkan anggota DPR yang akhir-akhir ini digembar-gemborkan sebagai koruptor justru menduduki baru peringkat ke empat. Pada 2008 ini, ada delapan orang yang diperkarakan oleh KPK.

Lebih lanjut, inilah pegawai negeri/penyelenggara negara yang paling banyak melakukan tindak pidana korupsi:

1. Pejabat eselon dan pimpro, 22 orang.
2. Duta besar, pejabat konsulat, imigrasi, 15 orang.
3. Kepala daerah (gubernur, bupati, walikota), 13 orang.
4. Anggota DPR/DPRD, 8 orang.
5. Dewan Gubernur/pejabat Bank Indonesia, 7 orang.
6. Komisi Negara, 2 orang.
7. Pejabat BUMN, 2 orang.
8. Aparat hukum, 1 orang.

Untuk swasta, KPK telah menyeret 16 orang selama 2008.

**F. OLAH RAGA : Tidak Ada**

**G. LINGKUNGAN HIDUP :**

#### **1. Twenty three small islands facing total destruction: NGO**

At least 23 small island in Indonesia are on the brink of total destruction due to mining activities, a non-governmental organization said.

"Based on our studies, more than 23 small islands in the country are now on the brink of total destruction due to mining activities," the People's Coalition for Justice Fisheries (KIARA), said in a press statement on Tuesday.

It said that the small islands were facing the threat of destruction because the mining activities did not take into account the islands' supporting capacity, environmental conditions and the livelihood of local residents.

KIARA said it was ironical to see the fact that the mining activities in the country's coastal and sea areas had been taken as a model for development which gave an emphasis on economic targets. (Antara)

#### **2. Badai Matahari Diperkirakan Muncul 2011-2012**

Badai matahari, suatu fenomena yang diperkirakan kemunculannya pada sekitar tahun 2011-2012, tidaklah berakibat kiamat, kata Pakar Antariksa dari LAPAN, Dr thomas Djamaluddin.

Tahun 2011-2012, diakui Djamal, di Jakarta, Selasa, adalah puncak aktivitas matahari yang mempunyai periode sekitar 11 tahun, jadi puncak aktivitas matahari pernah terjadi pada 1979, 1989, dan 2000.

Pada saat puncak aktivitas itu, bintik matahari meningkat jumlahnya akibat aktivitas magnetiknya dan mendadak berpengaruh terhadap ruang antar planet.

Pada saat-saat itu frekuensi kejadian lontaran partikel berenergi tinggi dan emisi gelombang elektromagnetik berupa percikannya juga meningkat. Namun menurut dia, badai matahari merupakan bagian dari cuaca di antariksa yang mirip dengan cuaca di bumi, hanya saja sifatnya berbeda.

Ia menjelaskan, badai matahari tidak berdampak langsung pada manusia, namun tetap berdampak pada benda-benda astronomi yang berada di sekitarnya.

Gangguan yang perlu dicermati menurut dia, hanya pada sistem teknologi yang ditempatkan di antariksa seperti satelit komunikasi dan navigasi serta sistem teknologi di bumi yang rentan terhadap induksi partikel energetik dari matahari yang masuk ke bumi lewat kutub.

Bila terjadi badai matahari potensi bahaya hanyalah kemungkinan rusaknya atau terganggunya satelit yang mengakibatkan antara lain gangguan telepon, siaran TV yang memanfaatkan satelit, serta jaringan ATM.

Selain itu, navigasi pada sistem penerima *global positioning system* (GPS) frekuensi tunggal dan siaran radio gelombang pendek juga bakal terganggu akibat adanya gangguan ionosfer. (Media Indonesia)

### III. ARTIKEL :

#### 1. Christmas message seeks to foster a peaceful society oleh Aloys Budi Purnomo

Our society has been marked by persistent and acute hardships and anxiety resulting from the ravages of conflicts and the threat of terrorism and wars. Rightly, humankind has gradually grown closer together and is everywhere more conscious of its own unity. But this road is not easy and we will not succeed in establishing a truly human world for everyone unless women and men everywhere devote themselves to the cause of true peace with renewed vigor.

A good example of the need for focused awareness and commitment in developing a peaceful society is given by the Bishops' Conference of Indonesia (KWI) and the Churches' Federation of Indonesia (PGI) in their Christmas message to all of Indonesia's Christians. In their message, the KWI-PGI urge Christians to realize that they are truly Indonesians. They should be conscious of their own unity as an integrated part of the nation.

Here we remember the local wisdom promoted by the late Mgr. Albertus Soegijapranata: We should be both 100 percent Christian and 100 percent Indonesian. Indonesia is our home as *Negara Kesatuan Republik Indonesia* (The United Republic of Indonesia). As Indonesians, the Christian should promote peace and brother-sisterhood.

Although we realize that it is not easy to live together in a truly peaceful situation today because of the conflicts that mark our society, we are optimistic in facing the future because we believe we can live together in peace and in cooperation with each other. That is why we want to foster a peaceful society inspired by the authentic message of Christmas.

As Vatican Council II stated, peace is more than the absence of war and conflict. It cannot be reduced to the maintenance of a balance of power between opposing forces nor does it arise out of despotic dominion, but it is appropriately called the "effect of righteousness". More than this, peace is the fruit of that right ordering of things with which the divine founder has invested human society and which must be actualized by men and women thirsting after an ever more perfect reign of justice.

Peace in our society flows from love of one another. It symbolizes and derives from the peace of Christ who was born in Bethlehem more than two thousand years ago. Therefore, all Christians should earnestly promote peace and speak the truth in love as well.

Based on the joy of Christmas that was sung loudly by the angels to the shepherds who were living out in the fields and keeping watch over their flocks by night, "Glory to God in the highest, and on earth peace, good will toward men!" (Luke 2:14), all Christians should join with all peace-loving men and women in pleading for peace.

Indeed, a peaceful society cannot be constructed unless the welfare of humanity is safeguarded and people freely and trustingly share with one another the riches of their minds and their talents. Accordingly, this society is really the fruit of love, for love goes beyond what justice can ensure. There is no peace without justice, and there is no justice without love.

It is very interesting that the KWI-PGI writes its Christmas' message based on the letter of St. Paul to the Romans, chapter 12, verses 17-21, through which we can understand the meaning of peace in a concrete way. According to St. Paul, we foster a peaceful society when we repay no one evil for evil, and desire only good things for all of its members.

So, as St. Paul urges, "If it is possible, and as much as it depends on you, live peaceably with all men. Beloved, do not avenge yourselves, but rather give no place to wrath. Therefore, if your enemy hungers, feed him; if he thirsts, give him a drink. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good."

Although we have been dwelling with those who hate peace, we should foster a peaceful society. By fostering this in our communities, we work to counter the opinion that the word peace is associated with sentimentalism, utopianism, radicalism, romanticism and even irresponsibility. Peace and justice are more real today and need to be actualized in our daily lives more than ever!

In Bethlehem, Jesus expressed his will to be a peacemaker. His "yes" of the peacemaker is a humble "yes" in a manger as a baby wrapped in swaddling cloths because there was no room for him in the inn. But it was really a very compassionate peace for all of humanity! Merry Christmas!

## **2. Partai Baru yang Primus Interminus Malum oleh Hajriyanto Y Thohari**

Pada harian Seputar Indonesia,3 Juni 2008, saya menulis bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah partai primus inter minus malum,yakni partai yang secara organisasional dan kedisiplinan paling baik di antara semua partaipartai lain yang rata-rata buruk.

PKS berhasil membuktikan diri sebagai satu-satunya partai politik yang solid, hidup, dan kuat. Salah satu karakteristik dari partai dengan genre ini adalah apa kata partai,itulah kata anggotanya! Sementara dalam partaipartai politik lain,mulai ada problem solidaritas dan soliditas: apa kata partai, tidak selalu paralel dengan apa kata anggota. Jadi keunggulan PKS adalah keunggulan komparatif karena partai partai yang lain buruk.

Kini PKS juga membuktikan diri sebagai partai yang sangat percaya diri (self-confident). Ada dua bukti yang cukup kuat yang dapat diajukan untuk mendukung pendapat ini. Pertama, PKS berani menampilkan mantan Presiden Soeharto dalam iklan politiknya sebagai bapak dan guru bangsa.Rasanya hanya partai yang percaya diri yang memiliki keberanian melakukan langkah politik yang oleh para analis politik dikatakan sebagai berisiko ini.

Partai Golkar yang jelas-jelas dibesarkan oleh mantan Presiden Soeharto sekalipun rasanya masih berhitung untuk melakukan langkah seperti ini. Golkar hanya pernah berani memberikan penghargaan kepadanya sewaktu peringatan HUT Partai Golkar.Itu pun maju mundur ketika kemudian dikecam oleh beberapa kalangan. PKS nyatanya berani mengambil langkah ini.

Kedua, PKS dengan tenang menghadapi kalangan NU dan Muhammadiyah yang kebakaran jenggot karena KH Hasyim Asy'ari dan KH Ahmad Dahlan dijadikan tokoh dalam iklan politik PKS di televisi.Kemarahan orang NU dan Muhammadiyah itu sendiri adalah lucu dan naif.Bukankah kedua tokoh besar tersebut telah menjadi pahlawan nasional yang dengan demikian telah menjadi milik nasional? Lantas, apa salahnya PKS sebagai bagian dari nation ini menjadikannya sebagai tokohnya?

Tak heran jika pemimpin-pemimpin PKS dengan mudah dapat menjawab protes-protes orang NU dan Muhammadiyah tersebut. Ketiga,melalui ketua Fraksi PKS di DPR,Mahfudz Siddiq, PKS menyatakan secara kategoris menolak wacana koalisi dengan partai-partai Islam yang lain.Ketika sejumlah partai Islam mewacanakan pembentukan koalisi atau persatuan partai-partai Islam menghadapi Pemilu 2009,PKS bukan hanya menyatakan tidak tertarik, melainkan lebih jauh dan lebih tegas lagi menolak jenis koalisi macam itu.

Sebagai partai Islam, penolakan kategoris PKS ini tentu sangat mengejutkan sekaligus mengagumkan.Ada beberapa kemungkinan atau hipotesis mengapa PKS mempunyai keberanian menolak ajakan (appeal)koalisi partaipartai Islam ini.Pertama,PKS melihat pengalaman selama ini bahwa koalisi partai-partai Islam selalu sangat artifisial dan superfisial, serta tidak pernah kuat. Koalisi partaipartai Islam hanya laksana burung merak yang hanya membuat kelompok lain pasang kuda-kuda saja. Sementara efektivitasnya nol besar.

Kedua, kemungkinan ini yang lebih besar, PKS tidak yakin dengan keislaman partai-partai Islam yang lain.Artinya, PKS merasa bahwa yang paling Islam adalah dirinya, dan

memandang partai-partai Islam yang lain hanya menjadikan Islam secara formal dan simbolistis semata, alias secara substansial tidak dirasakan eksistensinya. Bukti-bukti terhadap kecenderungan ini sangatlah banyak. Islam hanya ada dalam anggaran dasar semata, tetapi tidak berada dalam perilaku politik mereka. PKS, seperti pernyataan sebagian petinggiannya, menyatakan jauh lebih baik melakukan koalisi yang lintas ideologi.

Maksudnya, tentu saja lebih baik berkoalisi dengan partai-partai nasionalis atau kebangsaan, atau bahkan non-Islam, daripada bersatu dengan partai Islam lain. Dengan demikian logika mereka tentu saja tidak seperti ini: "Menolak berkoalisi dengan sesama partai Islam, malah berkoalisi dengan partai nasionalis," melainkan berbunyi: "Daripada berkoalisi dengan partai yang mengaku Islam (padahal tidak Islami) lebih baik sekalian berkoalisi dengan partai-partai yang tidak mempunyai klaim keislaman apa pun!" Logika yang jika diformulasikan berbunyi seperti itu rasanya hanya dimiliki oleh orang yang per-caya dirinya selangit.

Tentu analisis itu benar belaka. Sebab, PKS pasti didirikan karena ketidakpuasan alias kekecewaan terhadap partai-partai Islam yang sudah ada sebelumnya. Seperti dulu ketika warga NU dan Syarikat Islam (SI) tidak puas pada Partai Masyumi (1950- an), maka berdirilah Partai NU dan PSII yang terlepas dari Masyumi.

Ketika Zainuddin MZ dan kawan-kawan tidak puas alias kecewa dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), maka berdirilah Partai Bintang Reformasi (PBR). Ketika sebagian warga NU tidak puas dengan PKB maka dibentuklah PKNU. Ketika anak-anak muda Muhammadiyah tidak puas dengan Partai Amanat Nasional (PAN), maka berdirilah pula Partai Matahari Bangsa (PMB). Demikian seterusnya.

Pendirian sebuah partai politik baru dengan demikian tidak bisa dilihat hanya sebagai gejala fragmentasi politik semata, melainkan juga harus dibaca sebagai kritik terhadap partai politik existing. Artinya, ketika PKS didirikan, maka—diakui atau tidak—itu merupakan bentuk ketidakpuasan atas partai-partai Islam yang telah lama ada dan sekaligus sebagai kritik atas kinerja dan penampilan partai-partai Islam selama ini. Untuk dan atas alasan apa membuat partai Islam baru, dalam hal ini PKS, kalau mereka puas dengan partai-partai Islam yang telah lama ada?

Atau dengan kata lain, jika mereka puas dan nyaman dengan partai Islam lama, tentu tidak ada *raison d'être* pendirian partai Islam baru PKS. Sebagai partai Islam baru, PKS harus diakui sangat solid, hidup, dan kuat. Bahkan lebih dari itu, memiliki rasa percaya diri tinggi. Ini merupakan modal yang sangat berharga. Persoalannya adalah sampai kapan dan seberapa panjang nafas kehebatan mereka itu?

Partai Islam adalah partai Islam! Mau lama atau baru tetaplah partai Islam. Orang cukup hafal dengan karakter partai Islam di Indonesia selama ini. Ayo, kita lihat saja apa yang akan terjadi dalam beberapa tahun yang akan datang! (Koran Sindo)

#### IV. LAIN-LAIN :

##### 1. Jhony S. Mundung: Ini Gong Kematian Penyelamatan Hutan

Jhony Setiawan Mundung, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau, sedih mendengar Kepolisian Riau menghentikan penyidikan kasus illegal logging dan kerusakan hutan. Menanggapi surat perintah penghentian penyidikan (SP3) Polda Riau terhadap 13 dari 14 perusahaan yang disangka tersangkut pembalakan liar di Riau, Walhi mengajukan gugatan. Berikut wawancara Jupernalis Samosir dari *Tempo* dengan Jhony Setiawan Mundung, Selasa (23/12).

**Kepala Polda Riau Brigadir Jenderal Hadiatmoko, Senin (22/12), mengeluarkan SP3 atas 13 dari 14 perusahaan yang diduga merusak hutan Riau. Apa komentar Anda?**

Ini menyakitkan. Bukan saja bagi saya pribadi dan kawan kawan aktivis lingkungan, tapi juga melukai hati masyarakat Riau.

**Usaha aktivis lingkungan menyelamatkan hutan Riau apa menjadi sia-sia?**

Selaku pihak pelapor pada 15 Maret 2007 dan yang mengetahui betul kondisi hutan, kami ingin ada penegakan hukum atas tindak pidana perambahan hutan yang sudah pada tahap pemusnahan. Waktu itu polisi sangat agresif menanggapi laporan kami.

Isi berita diluar tanggungjawab Direktorat Infomed, Deplu

Perambahan hutan secara besar-besaran di Riau dilakukan oleh 42 perusahaan. Perusahaan itu umumnya terafiliasi dengan dua pabrik kertas besar. Polisi lantas menyidik 14 perusahaan. Kami berkeyakinan inilah awal penegakan hukum dan penyelamatan lingkungan di Riau. Kami juga berupaya membantu polisi berupa memberikan bukti dan informasi. Yang terjadi justru dalam penyidikan polisi berkas perkara sudah 17 kali bolak balik dari penyidik dan penuntut (Kejaksaan Tinggi Riau).

### **Apa yang Anda ketahui tentang berkas perkara yang dikembalikan Kejaksaan waktu itu?**

Waktu berkas dikembalikan oleh Kejaksaan kami masih dapat memahami. Kami mengira memang urusan hutan dan kehutanan itu rumit. Hingga Agustus 2008 kami masih sabar menunggu, lantaran Polda saat itu menyakinkan kami bahwa mereka akan mampu memenuhi kemauan penuntut Jaksa. Tapi, memasuki November 2008, kami mencium gelagat yang tidak benar. Kami melihat saat itu ada keinginan oknum tertentu, baik penyidik maupun penuntut, agar kasus 14 perusahaan yang diberkas itu terus mengambang. Kami melihat ada konspirasi.

### **Artinya, berkas tersebut sebenarnya bisa dilengkapi sesuai keinginan Jaksa?**

Jaksa menyebut bahwa semua berkas tidak lengkap. Ada kekurangan, khususnya menyangkut barang bukti, saksi ahli dan sebagainya. Polisi menyebut, mereka sudah maksimal memenuhi semua keinginan penuntut. Perdebatan di sini yang membuat kami curiga.

### **Salah satu yang dipersalkan jaksa adalah saksi ahli. Kenapa?**

Polda Riau waktu itu mengusung saksi ahli dari IPB (Institut Pertanian Bogor). Jaksa bersikukuh minta saksi ahli dari Departemen Kehutanan. Saksi ahli dari kalangan akademisi menyebut ada kerusakan lingkungan dan kesalahan perizinan.

Sementara itu, saksi ahli dari Departemen Kehutanan menyebut semua perusahaan memiliki izin dan tidak ada masalah. Sedangkan saksi Kementerian Lingkungan Hidup menyebut tidak ada masalah dan tidak ada kerusakan lingkungan. Ini benar benar gila.

### **Dengan kesaksian itu apakah posisi penyidik menjadi lemah?**

Belakangan, memang, polisi terkesan menyerah. Sedangkan jaksa tidak berupaya mengambil alih kasus ini atau istilahnya P22. Ini yang menguatkan dugaan adanya konspirasi Kejaksaan dan Kepolisian dalam kasus ini. Sudah jelas dalam Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Perkebunan dan sejumlah Keputusan Menteri Kehutanan menyebut hutan tanaman industri tidak boleh di atas hutan alam. Begitu juga soal lahan gambut dan sejumlah aturan lainnya, yang jelas dilanggar. Tapi Departemen Kehutanan menyebut perusahaan itu tdiak ada masalah lantaran memiliki izin.

### **Itukah yang Anda sebut ada konspirasi?**

Begini, yang ironis adalah keterangan saksi ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup yang menyebut tidak ada dampak lingkungan yang diakibatkan oleh izin perambahan hutan. Padahal, secara kasat mata jelas Riau saban tahun banjir saat musim hujan dan kebakaran hutan ketika musim kemarau. Asap hutan sampai ke negara tetangga. Ini nyata dan semua penduduk Riau terkena dampaknya.

### **Apa rencana Walhi selanjutnya?**

Kami mendesak Kepala Polda Riau dan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau dicopot. Mereka telah melukai rasa keadilan penduduk Riau. Mereka patut diperiksa. Kami tengah menyusun praperadilan. Inilah satu-satunya yang dimungkinkan aturan hukum.

## **Bagaimana jika desakan Anda tak digubris pemerintah?**

Kami akan terus berkampanye kepada dunia internasional agar mendukung gerakan kami dalam melawan konspirasi jahat ini. Ini gong kematian bagi penegakan hukum dan penyelamatan hutan Riau. (Tempo Interaktif)

### **V. EDITORIAL :**

#### **1. Christmas: Do not be afraid**

Today thousands of Protestants and Catholics are flocking to Bethlehem, the birthplace of Jesus Christ, to attend midnight holy mass to celebrate his birth. Palestinians and Israelis -- for their own economic and, probably, religious reasons -- have little choice, for a brief respite, but to work together to ensure safety at the annual religious event. More than 1 billion followers of Christ throughout the world will sing Christmas' most well-known song on Christmas Eve, "Silent Night". A merry and festive day.

This year the world is facing a gigantic financial crash. Even the most powerful financial institutions -- whose assets amount to billions of U.S. dollars -- have perished. And even the most cynical economists in this world could not have imagined the extent to which the crisis could be so devastating for the population of this planet, or that it may well take years to recover. Millions of workers on this globe have lost or will lose their jobs with no safety net in sight.

Through the uncertainty God continues to reiterate His assurances to us: Fear not! According to the Gospel, the angels told the shepherds not to be afraid because Jesus, the savior of all humankind, had already been born in Bethlehem. Jesus -- a prophet under Islamic tenets, a God under Christian ones -- through his teachings continually sends us the same strong assurance: Do not be afraid!

Still, the United States, the world's largest economy, is staring in the face of the worst economic crisis since its Great Depression of the 1930s. Meanwhile the rest of the world, including the consumer and consuming giants China and the European Union, are also contending with shrinking, even imperiled, economies. Perhaps Jesus' followers will find it very difficult to be persuaded when clergy repeat today and tomorrow their Lord's promise they have nothing to worry about because He is always with them.

Many of us, including Indonesians, are indeed afraid and feel powerless in the face of this economic catastrophe. Although our leader, President Susilo Bambang Yudhoyono, has repeatedly tried to convince us Indonesians that we should not be afraid because the fundamentals of our economy are solid, how can we not feel terrified when the threat of losing so many of our jobs looms so close?

When terrorists attacked several churches in Indonesia by bombing them on Christmas Eve in 2000, freedom of religion, which is fully guaranteed by the Constitution, was clearly in great danger. Hundreds of churches in this country -- including those with all their legal documents in order -- have been torched or forced to close in the last several years. It is a gloomy trend both for the minority and for most of the silent Muslim majority in this country.

Nowadays many churchgoers are still worried about terrorist attacks. We should be honest and acknowledge the police have always tried their best to protect people who go to church on Christmas Eve and other major Christian holidays such as Easter since the attacks of 2000. Many of us feel more secure because of the police presence. We do hope, no matter what religion we attest to or belief we have, no security disturbances will mar these annual celebrations.

Many non-Muslims in this country incessantly gripe that the government has no interest in guaranteeing freedom of religion. Our Muslim compatriots often perceive the minority, Protestants and Catholics in this context, as selfish, overly eager to dominate through economic power and even willing to stack the deck through discriminatory practices.

For many children Christmas is a joyful and cherished celebration, because they believe Santa Claus will bring them presents during the night as they sleep. Loving parents can get wrapped up in their role as Santa Claus, overemphasizing the material side that accompanies this holiday season.

While the world economy looks inescapably gloomy, with Indonesia posing no exception, Christians in Indonesia and across the globe will celebrate this holiday with hardship on their minds. Jesus was born to very poor parents. It is against His teachings if we use this commemoration to show off our wealth and do not care for the poor and the needy.

Merry Christmas, may peace and prosperity prevail in our country and the world! (The Jakarta Post)

## 2. Melucuti dengan Tegas Semua Rekening Liar

Rupanya hebat benar sikap kepala batu banyak pejabat negara di negeri ini sehingga berani menolak membubarkan rekening liar. Itulah keras kepala yang menunjukkan perlawanan, tepatnya pembangkangan terhadap kemauan politik untuk menegakkan pemerintahan yang bersih. Menteri Keuangan Sri Mulyani telah berulang kali mencanangkan agar rekening liar itu ditutup dan uangnya diserahkan ke kas negara. Menteri pun telah membentuk tim untuk menertibkan rekening liar itu.

Namun, yang terjadi justru sebaliknya, pemegang rekening liar itu semakin keras kepala menolak menutup rekening liar yang dimilikinya. Banyak pejabat negara tetap bersikukuh mempertahankannya.

Sikap kepala batu itu tak bisa lagi dilunakkan dengan imbauan, juga tak mempan sekalipun telah dihunjam dengan kata-kata yang keras. Semua itu tak diindahkan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani kiranya telah sampai di tapal batas kesabaran dan kemudian mengambil langkah yang layak dipuji, yaitu menyerahkan urusan rekening liar tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jumlahnya luar biasa. Pada 18 Desember lalu, Tim Penertiban Rekening Departemen Keuangan telah menyerahkan 260 rekening liar senilai Rp314,223 miliar dan US\$11,024 juta kepada KPK.

Pejabat di departemen dan lembaga negara memang tidak dibenarkan mengumpulkan pungutan bukan pajak tanpa menyetornya ke kas negara. Aturan mengenai hal itu sangat gamblang, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara bukan Pajak.

Bila ada kepentingan membuat rekening untuk menampung dana anggaran pun, hal itu harus dilaporkan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Menteri atau pemimpin lembaga dapat membuka rekening untuk penerimaan. Tetapi, itu hanya setelah mendapat persetujuan bendahara negara, yakni Menteri Keuangan, yang pada dasarnya merupakan *chief financial officer* Republik Indonesia.

Terkait dengan 260 rekening yang dilaporkan ke KPK, posisinya jelas, yaitu Menteri Keuangan tidak memberikan persetujuan, bahkan telah menginstruksikan agar rekening-rekening tersebut ditertibkan. Akan tetapi, pemilik rekening itu membandel, tepatnya keras kepala. Itu jelas tindakan yang meremehkan wibawa pemerintah dan sangat tegas merupakan pelecehan terhadap aturan negara.

Yang lebih memalukan ialah di antara rekening liar itu terdapat pula rekening yang dimiliki lembaga negara yang seharusnya sangat patuh kepada hukum.

Oleh karena itu, memang harus diambil langkah serius untuk menertibkannya. Jangan biarkan mereka berdalih, dengan alasan apa pun, lalu seenaknya menerima dan menggunakan uang negara. Semua uang negara mestinya masuk ke kas negara.

Dengan diserahkannya urusan rekening liar ke KPK, duduk perkara menjadi tajam masuk ke ranah pidana korupsi. Kita yakin KPK akan mengambil tindakan yang tangkas dan cepat seperti telah ditunjukkan lembaga tersebut selama ini, yakni segera memeriksa 260 rekening liar itu.

Kita dorong KPK untuk menjadikan rekening liar sebagai bukti untuk menyeret pejabat negara yang keras kepala itu sebagai pelaku korupsi.

Tindakan hukum perlu diambil agar pejabat publik jera mencari-cari celah untuk membuka rekening semauanya. Bila KPK turun tangan, publik percaya kepala batu itu akan meleleh. (Media Indonesia)

**Jakarta, 24 Desember 2008**  
**Sub Direktorat Berita**  
**Direktorat Informasi dan Media**  
**Deplu**